



KESIAPAN PUSAT KAJIAN ANGGARAN DALAM PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020, Pusat Kajian Anggaran telah memenuhi batas minimal survei , tetapi belum memenuhi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NILAI KOMPONEN		TOTAL NILAI	IPP	IPAK	CATATAN/REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
PENGUNGKIT	HASIL					
34,61	36,46	71,07	3,54	3,67	<p>Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan agar setiap individu agen perubahan dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi, isu strategis dan reformasi birokrasi</p> <p>Memberi penguatan integritas aparatur dengan melakukan pemetaan/identifikasi dan memitigasinya yang diharapkan mampu terdeteksi sejak dini potensi penyimpangan yang mungkin terjadi</p> <p>Meningkatkan penerapan tata kelola internal dan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan</p>	<p>Peningkatan monev dan peran agen perubahan</p> <p>Sudah tercantum dalam dokumen yg menggambarkan hubungan Quality Risk Register ISO 9001:2015 dengan pembangunan Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran</p> <p>Pusat Kajian Anggaran telah memiliki IG, dan beberapa kegiatan/layanan juga telah memanfaatkan media sosial (WAG) seperti BIB disampaikan melalui sarana WA kepada Kabagset AKD. Informasi ini kemudian dikemas dalam bentuk infografis dalam IG Pusat Kajian Anggaran.</p>

PENCAPAIAN TATA KELOLA BERBASIS REFORMASI BIROKRASI

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Manajemen Perubahan (Hasil Survey Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan BK DPR RI)	72.65	74.22	80.04	80,23	80,74
2	Tata Laksana	Sudah ada SOP	Sudah ada SOP dan Website	SOP berstandar ISO 9001:2015 Certificate Number: IR/QMS/00138	- SOP berstandar ISO 9001:2015 Certificate Number: IR/QMS/00138 - Pemutakhiran Website	- SOP berstandar ISO 9001:2015 Certificate Number: IR/QMS/00138 - Pemutakhiran Website
3	SDM	PNS (Analisis APBN dan Staf TU) 16 orang	PNS (Analisis APBN dan Staf TU): 18 org	PNS (Analisis APBN dan Staf TU): 17 org	PNS (Analisis APBN dan Staf TU): 27 org	PNS (Analisis APBN dan Staf TU): 27 org
			PPNASN: 10 org	PPNASN: 21 org	PPNASN: 17 org	PPNASN: 17 org
4	Penguatan Akuntabilitas (Penyerapan Anggaran)	91.10%	99,25%	96.61%	99.59%	98,87%
5	Pelayanan Publik (Produk)	Analisis, Referensi, Buletin, Buku & ARC	Analisis, Referensi, Buletin, Buku, ARC	Analisis, Referensi, Buletin, Buku & ARC, Infografis, Videografis	Analisis, Referensi, Buletin, Buku & ARC, Infografis, Videografis	Analisis, Referensi, Buletin, Buku & ARC, Infografis, Videografis, BIB, Ringkasan Kajian PP RAPBN 2022
			Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan
6	Pengawasan	Tidak ada kasus	1 KASUS INDISCIPLINER	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

INPUT

PROSES

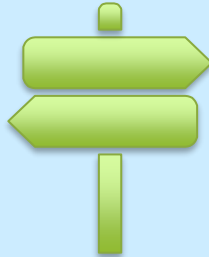
OUTPUT

3. SDM

4. AKUNTABILITAS



2. TATA LAKSANA

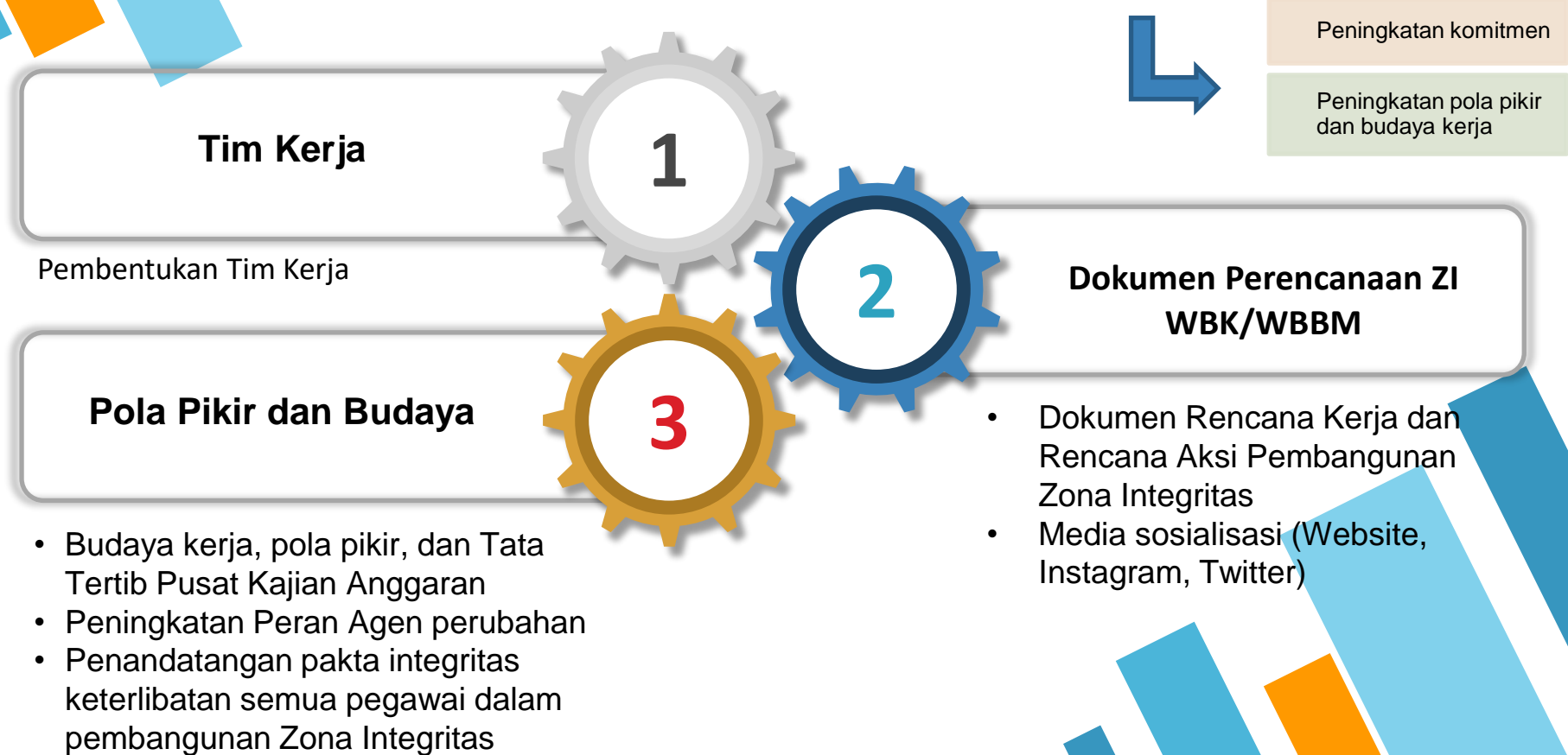


6. PELAYANAN PUBLIK



5. PENGAWASAN

AREA II : MANAJEMEN PERUBAHAN



AREA II : PENATAAN TATALAKSANA



Efisiensi dan efektifitas proses bisnis

Penggunaan IT

SOP mengacu peta proses bisnis



- Sejak 2018 PKA sudah mendapat ISO 9001:2015
- Melakukan survey untuk penyempurnaan SOP yang diperlukan

E-office



Keterbukaan Informasi Publik



- Pemberian pelayanan kepada publik sudah melalui Website (pengembangan dan updating), dan Instagram

- Infografis prosedur permintaan analisis
- Penggunaan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM

AREA III : MANAJEMEN SDM



Profesionalisme &
Efektifitas Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

- Menyusun usulan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK

1

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Menyusun analisis kebutuhan diklat dan rencana pengembangan kompetensi pegawai
- Menyusun matriks kompetensi pegawai dgn standar kompetensi

3

Sistem Informasi Kepegawaian

- Memonitor data SIAP dan menyampaikan hasilnya kepada Bagaian Kepegawaian

5

Pola Mutasi Internal

- Penilaian kinerja untuk pegawai yang mutasi/promosi

2

Penetapan Kinerja Individu

- Memberikan reward/penghargaan bagi analis berprestasi
- Penyusunan SKP secara berjenjang

4

AREA IV : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA



Peningkatan
akuntabilitas kinerja

Keterlibatan Pimpinan

1

Penyusunan SAKIP, Renja, Renstra,
Perjanjian Kinerja, LAK

2

Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja

Target penyerapan di atas 90%
setiap tahunnya

AREA V : Penguatan Pengawasan



Kepatuhan, efektifitas & efisiensi pengelolaan sumber daya

Pengendalian Gratifikasi

- Melakukan publik campaign melalui pemasangan Banner anti Korupsi di website Pusat Kajian Anggaran

1

Penerapan SPIP

- Penerapan Audit internal dan Eksternal ISO 9001:2015
- Dokumen SK TIM SPIP dari ITTAMA

2

Pengaduan Masyarakat

- Kritik dan Saran terhadap Pusat Kajian Anggaran

3

Whistle-Blowing System

Pernyataan Surat Keterangan dari Irtama bahwa tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi pada Pusat Kajian Anggaran

4

Penanganan Benturan Kepentingan

- PKA telah melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas/fungsi utamanya (Persekjen No. 8/2015)

5

AREA VI : PELAYANAN PUBLIK



Standardisasi Pelayanan

Indeks Kepuasan Anggota Dewan

Standar Pelayanan

1

- PKA telah memasang Maklumat dan menyusun dokumen standar pelayanan

Budaya Pelayanan Prima

2

- PKA telah memiliki berbagai channel (IG dan Website) untuk memberikan layanan terbaik
- Budaya Pelayanan Prima PKA
- *Budget In Brief* (BIB) Komisi-Komisi

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

3

- Survey kepuasan terhadap pelayanan Pusat Kajian Anggaran

KONDISI BEFORE - AFTER

Kondisi Awal	ISO 9001:2015	Pembangunan ZI
» Pelayanan bersifat pasif	» Pendampingan AKD » Pendampingan di Unit Lain	» Maklumat Pelayanan » Mekanisme ARC » Survei Kepuasan Anggota Dewan
» Sosialisasi tidak optimal	» Pembangunan Website Pusat Kajian Anggaran	» Website Up-to-date » Instagram
» Quality Control belum optimal	» SOP Analisis » Formulir Tinjauan Proses	» Revisi SOP Analisis » SOP <i>BIB</i> » Database Materi Pakar Ekonomi



Kondisi Awal	ISO 9001:2015	Pembangunan ZI
» Budaya Kerja belum Optimal	» Membagi habis tugas » Penerapan SOP	» Penyelesaian tugas tepat waktu » Rapat tepat waktu » Reward bagi Analis berprestasi
» Ada gap kompetensi	» Membagi habis tugas » Penerapan SOP » Variasi Output PKA	» Analisis Kebutuhan Diklat » Matriks kompetensi Pegawai

IDENTIFIKASI RISIKO

KAITAN QUALITY RISK REGISTER ISO 9001:2015 DENGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

QUALITY RISK REGISTER ISO 9001:2015								PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	
NO	KEGIATAN	TUJUAN	PROSES YG DIKENDALIKAN	IDENTIFIKASI RISIKO			PENGENDALIAN	AREA	INOVASI
				Risiko	Penyebab	Dampak			
1	Penyusunan Analisis	Menghasilkan analisis yang akurat dan tepat waktu sesuai siklus APBN	Pengumpulan data dan informasi sumber analisis	Kuantitas dan kualitas data serta informasi kurang optimal	Keterbatasan sumber data dan narasumber	Hasil analisis kurang optimal	- SOP dan Kebijakan - Database Pakar Ekonomi	1. Pola Pikir dan Budaya Kerja	- Penegakan Disiplin pegawai - Rapat Tepat Waktu
				Penyampaian output tidak tepat waktu	Siklus APBN yang ketat/berdekatan	hasil analisis tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu			
2	Pendampingan AKD	Memberikan data dan informasi yang akurat, tepat waktu sesuai siklus APBN	Pengumpulan data dan informasi sumber analisis	Kurangnya jumlah SDM Analis APBN	Belum terpenuhi kuota ideal jumlah Analis APBN dengan jumlah mitra kerja komisi	Tidak terpenuhinya tim pendampingan di AKD	- SOP dan Kebijakan	3. Manajemen SDM	- Menyusun analisis kebutuhan diklat dan rencana pengembangan kompetensi pegawai - Menyusun matriks kompetensi pegawai dgn standar kompetensi
				Kurangnya peningkatan kompetensi Analis APBN	Kurangnya pendidikan dan pelatihan	Informasi yang diberikan kurang optimal			



TERIMA KASIH

